

**PERAN END CHILD PROSTITUTIONS AND TRAFFICKING (ECPAT)
DALAM MENANGANI EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK
DI THAILAND TAHUN 2016-2019**

Oleh: Annisa Mawaddah Rhimadani
Pembimbing: Dr. Umi Oktyari Retnaningsih, MA
(email: annisa.mawaddah3237@student.unri.ac.id)

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km.12,5 Simpang Baru, Pekanbaru,
28294, Telp/Fax (0761) 632277

ABSTRACT

Commercial sexual exploitation of children still frequently occurs in the world, particularly in Thailand. The extremely high level of vulnerability has drawn the attention of international organizations to take preventive measures. One international organization actively addressing the issue of child sexual exploitation is End Child Prostitution and Trafficking (ECPAT). This study elaborates on the important role of ECPAT in dealing with issues related to child exploitation practices.

This research utilizes Civil Society Organization (CSO) theory to analyze the role of ECPAT in addressing the issue of Commercial Sexual Exploitation of Children (CSEC) in Thailand. The research method used is qualitative with an analytical descriptive model. Secondary data is obtained through a literature review from various sources, including books, academic journals, official websites, and annual reports from relevant organizations.

ECPAT plays three key roles in preventing child sexual exploitation in Thailand. First, as an educator, ECPAT provides education on the dangers of sexual exploitation in schools. Second, as an agenda setter, ECPAT researches new trends and designs preventive policies. Third, as a counterpart, ECPAT collaborates with private institutions, NGOs, INGOs, and the government to strengthen efforts in the prevention and handling of CSEC cases. This study demonstrates that ECPAT has effectively implemented its programs despite facing significant challenges. With strong commitment, ECPAT has played a crucial role in reducing the incidence of commercial sexual exploitation of children in Thailand in 2019.

Keywords: *ECPAT, Commercial Sexual Exploitation of Children (CSEC), Thailand, Civil Society Organization (CSO).*

PENDAHULUAN

Isu-isu kemanusiaan termasuk ke dalam isu yang paling menarik untuk dibicarakan, di antaranya adalah isu eksploitasi anak. Eksploitasi adalah suatu tindakan atau sebuah aktivitas yang memanfaatkan sesuatu secara berlebihan dan sewenang-wenang untuk kepentingan pribadi dan sangat merugikan bagi korbannya baik dari segi materi, fisik ataupun psikis.

Eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) adalah sebuah tindakan ataupun aktivitas di mana anak-anak diperlakukan sebagai objek aktivitas seksual komersial yang menyinggung pada tindakan pemaksaan dan kekerasan serta mengarah pada perilaku kerja paksa dan perbudakan modern. Isu ini pertama kali diidentifikasi sebagai permasalahan global pada tahun 1996 dalam Kongres Dunia Menentang Eksploitasi Komersial Anak di Stockholm.

ESKA merupakan isu kompleks yang sangat membutuhkan perhatian serta kepedulian dari masyarakat internasional.¹ ESKA tidak hanya mencakup prostitusi saja, namun juga mencakup pornografi, eksploitasi seksual dan *child trafficking*. *Child trafficking* yang dimaksud ialah perekrutan, penerimaan anak melalui penipuan, pemaksaan atau kekerasan dengan tujuan eksploitasi.² Secara umum,

ESKA adalah anak-anak yang terlibat dalam aktivitas seksual untuk mendapatkan keuntungan materi oleh pihak ketiga.

Berdasarkan hukum Internasional dan banyak hukum nasional, anak di bawah umur yang terlibat dalam aktivitas seksual komersial dianggap sebagai korban eksploitasi, terlepas dari apakah mereka nampak sukarela atau dipaksa.³ Anak-anak di bawah umur tidak memiliki kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan yang valid terhadap eksploitasi seksual komersial. memerlukan perlindungan dan bantuan.

Hukum nasional Thailand memiliki peraturannya sendiri dan Thailand juga ikut meratifikasi konvensi Internasional yaitu *Convention of the Rights of the Children* (CRC) pada tahun 1992. Selain itu, Thailand juga ikut menandatangani perjanjian Palermo pada 13 Desember 2000 dan meratifikasinya pada 17 Oktober 2013. Perjanjian Palermo yang merupakan perjanjian Internasional utama yang bertujuan untuk memerangi kejahatan terorganisir lintas negara.

Dengan meratifikasi perjanjian ini, memungkinkan Thailand untuk bekerja sama dengan negara-negara lain dalam membagi informasi, mengekstradisi tersangka dan memberikan bantuan hukum

¹ United Nations Office on Drugs and Crime, "Strengthening Thai Laws to Fight Travellers Who Sexually Abuse Children" (<https://www.unodc.org/roseap/en/2012/03/childhood-workshop-thailand/story.html>), diakses pada 28 Maret 2024).

² Save the Children, "The Fight Against Child Trafficking"

(<https://www.savethechildren.org>, diakses pada 25 Mei 2024).

³ Jordan Greenbaum, et al., "Exploitation, Labor, and Sex Trafficking of Children and Adolescents: Health Care Needs of Patients" (<https://publications.aap.org/pediatrics/article/151/1/e2022060416/190310/Exploitation-Labor-and-Sex-Trafficking-of-Children?autologincheck=redirected>, diakses pada 24 Mei 2024).

timbang balik dalam penyelidikan serta penuntutan kejahatan terorganisir.⁴

Pada tahun 2006, CRC di bawah UN yang memonitori implementasi yang dilakukan Thailand menyatakan bahwa Thailand gagal melindungi hak-hak anak dengan maraknya pelanggaran hak anak hingga membiarkan terjadinya praktek Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) oleh wisatawan asing ataupun domestik.⁵ Salah satu NGO yang hadir untuk memerangi isu eksploitasi seksual komersial anak adalah *End Child Prostitutions and Trafficking* (ECPAT) yang pertama kali didirikan oleh aktivis dan relawan di Chiangmai, Thailand pada tahun 1990 yang awalnya dikhususkan untuk menangani masalah eksploitasi seksual anak di wilayah utara Thailand.

Hal itu dilakukan dengan menjalankan banyak program seperti Studi Global Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak dalam Pariwisata (SECTT), Program *Disrupting Harm*, inisiatif untuk melibatkan sektor swasta seperti industri pariwisata dan perhotelan dan sebagainya. Sejauh ini, ECPAT telah berhasil mengurangi jumlah kasus eksploitasi seksual anak dalam sektor pariwisata Thailand dengan upaya

kolaboratif bersama pemerintah dan lembaga swasta dengan sekretariat Internasionalnya berada di Bangkok.⁶

KERANGKA TEORI

Teori Civil Society Organization

Menurut Merriam-Webster, teori merupakan ide atau prinsip-prinsip umum yang berhubungan dengan fakta-fakta pada pokok persoalan. Sedangkan menurut Kerlinger, teori adalah sekumpulan asumsi, konstruk, pendapat, definisi ataupun proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial ataupun isu sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep yang ada.⁷

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori *civil society organization* yang beranggapan bahwa entitas non-pemerintah memainkan peran penting dalam memperkuat masyarakat melalui berbagai macam kegiatan sosial, ekonomi dan politik. Menurut Boussard⁸, CSO memainkan peran vital dalam proses demokratisasi, terutama di negara-negara yang sedang beralih dari rezim otoritarian.

CSO dapat menyediakan platform kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik dan memastikan suara-

⁴ United Nations Office on Drugs and Crime, "United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto" (<https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html>), diakses pada 24 Mei 2024).

⁵ Eka Mulyani Lestari, I Made Anom Wiranata, dan Putu Titah Kawitri, "Peran ECPAT dalam Menangani CSEC Oleh Wisatawan Asing di Thailand". Jurnal Harian Regional. Vol. 3 No. 3, 2014, hal 2.

⁶ ECPAT International, "ECPAT Thailand" (<https://www.ecpat-th.org/>), diakses pada 24 Mei 2024).

⁷ Merriam-Webster, "Hypothesis vs. Theory: The Difference Explained" (<https://www.merriam-webster.com/words-at-play/hypothesis-vs-theory-difference>), diakses pada 02 Desember 2023).

⁸ Caroline Boussard, "Crafting Democracy: Civil Society in Post-Transition Honduras (Lund: Lund University, 2003), hal 46

suara yang berbeda dapat didengar. Civil Society Organizations (CSOs) memiliki peran strategis dalam membangun masyarakat yang partisipatif dan mendorong keadilan sosial. Dalam konteks ini, CSOs menjalankan beberapa peran utama: sebagai pembuat agenda (*agenda setter*), pendidik (*educator*), mitra (*counterpart*), dan sumber alternatif politik (*source of new political alternatives*).⁹

Sebagai agenda setter, CSOs berperan dalam mendorong isu-isu penting untuk memperoleh perhatian publik dan pemerintah. Peran educator yang dimiliki CSOs memungkinkan mereka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai berbagai masalah sosial. Sebagai counterpart, CSOs sering berkolaborasi dengan pemerintah dan organisasi internasional dalam menangani berbagai isu sosial.

Kolaborasi ini memungkinkan CSOs memberikan masukan yang berbasis pada pengalaman lapangan dan pengetahuan lokal yang mereka miliki, yang pada akhirnya memperkaya efektivitas program pemerintah atau organisasi internasional.

Selain itu, CSOs juga bertindak sebagai *source of new political alternatives* atau sumber alternatif politik, di mana mereka menyediakan solusi atau pendekatan baru terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Dalam hal ini, ECPAT mengambil peran sebagai *agenda setter*, *educator* dan *counterpart* dengan melakukan banyak strategi serta program yang relevan.

⁹ Caroline Boussard, *Civil Society and Democratization: Social Movements in Northeast Thailand* (Copenhagen: NIAS Press, 2002), 67

Tingkat Analisis: Kelompok

Level analisis adalah target analisis itu sendiri, di mana peneliti akan mendapat gambaran dan penjelasan serta perkiraan yang akurat tentang sesuatu. Level analisis yang ada di hubungan internasional juga berbeda-beda, yang berarti peneliti dapat memilih untuk fokus pada suatu kajian masalah secara keseluruhan.¹⁰ Pada penelitian ini, penulis menggunakan tingkat analisis kelompok. Tingkat analisis ini berasumsi bahwa yang menjadi fokus utama adalah mempelajari perilaku kelompok ataupun organisasi-organisasi yang terlibat di praktik hubungan internasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan model deskriptif analisis, yakni menunjukkan bagaimana aktor non negara bertindak dan berinteraksi dalam suatu isu permasalahan, analisisnya lebih bersifat deskriptif (menjelaskan) interaksi antar aktor dan negara serta yang dianalisis adalah bagaimana menjelaskan model kebijakan pemerintah, kerja sama antar keduanya dan apa yang berhubungan ataupun yang tidak berhubungan dengan kondisi-kondisi tersebut.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap

¹⁰ Carmen, Gebhard, "Student Feature – Level of Analysis" (<https://www.e-ir.info/2018/02/25/student-feature-levels-of-analysis/>, diakses pada 15 Januari 2024).

subjek. Tujuan dari metode penelitian kualitatif adalah untuk menunjukkan bagaimana aktor negara ataupun non negara bertindak dan berinteraksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Thailand

Eksploitasi seksual anak di Thailand sangat mengkhawatirkan juga, hal ini tak lepas dari fakta bahwa Thailand sendiri menjadi tujuan wisata seks sejak akhir tahun 1970-an, karena konsumen prostitusi di negara Thailand yang sangat banyak. Bermula dari kedatangan militer Amerika yang pada saat itu sedang cuti dan melakukan rekreasi saat perang dengan Vietnam pada tahun 1962, menjadi faktor pendorong berkembangnya industri seks di Thailand.

Zona-zona khusus seperti Patpong di Bangkok dan Pattaya telah tumbuh menjadi pusat perdagangan seksual yang terkenal. Perdagangan manusia di Thailand tidak hanya menyangkut prostitusi dewasa, namun juga anak-anak. Anak-anak sering kali dieksploitasi untuk terlibat dalam eksploitasi seksual, yang merupakan pelanggaran serius.¹¹

Di Thailand, eksploitasi seksual komersial terhadap anak-anak (ESKA) melibatkan berbagai pelaku dengan beragam modus operandi. Para pelaku eksploitasi

anak termasuk wisatawan seksual, terutama yang berasal dari luar negeri, serta individu lokal yang seringkali merupakan bagian dari jaringan perdagangan manusia atau beroperasi secara independen melalui teknologi. Kemajuan teknologi memfasilitasi bentuk eksploitasi ini, di mana media sosial digunakan untuk merekrut, memanipulasi, dan mengeksploitasi anak-anak secara daring.

Anak-anak di Thailand yang berada dalam kondisi ekonomi lemah, berasal dari keluarga migran, atau statusnya tanpa kewarganegaraan lebih rentan menjadi korban eksploitasi seksual.¹² Data dari ECPAT International menunjukkan bahwa banyak korban ESKA di Thailand adalah anak-anak berusia 12 hingga 17 tahun yang terperangkap dalam perdagangan manusia atau eksploitasi seksual sebagai hasil dari kemiskinan dan kurangnya perlindungan.

Beberapa anak bahkan didorong oleh keluarga mereka sendiri untuk bekerja di industri ini karena tekanan ekonomi. Jumlah anak yang menjadi korban ESKA terus meningkat, terutama di kawasan wisata dan kota besar, meskipun upaya pemerintah dan lembaga non-pemerintah terus dilakukan untuk menekan praktik ini dengan meningkatkan pengawasan dan program pencegahan.¹³

Setidaknya ada 3 bentuk eksploitasi seksual komersial anak di

¹¹ International Labour Organization (ILO), *Child Labour and Exploitation in Thailand: An Analysis of Thai Law and Practice* (Geneva: ILO, 2020), 42

¹² UNICEF Thailand dan ECPAT Foundation, *An Uphill Battle: Child Trafficking Survivors in Thailand Struggle for Justice* (2023), <https://www.ecpat.org/child-trafficking->

[survivors-in-thailand](#). Diakses pada 12 November 2024.

¹³ ECPAT International, *Situational Analysis of the Commercial Sexual Exploitation of Children in Thailand* (2015), <https://ecpat.org/situational-analysis-thailand>. Diakses pada 12 November 2024

Thailand, yaitu perdagangan dan wisata seks anak, eksploitasi seksual online terhadap anak, dan perkawinan anak. Selain karena negara Thailand memiliki industri wisata seksual yang dikenal besar, banyak faktor pendukung lain yang mendorong maraknya praktek ESKA yaitu adalah disfungsi keluarga, disparitas ekonomi, lemahnya penegakan hukum, dan Thailand sebagai negara sumber.

Tentu saja aktivitas eksploitasi membawa dampak yang nyata dan beragam, mulai dari dampak terhadap kesehatan fisik dan mental hingga dampak sosial dan ekonomi. Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual sering kali mengalami masalah kesehatan fisik yang serius, seperti penyakit menular seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS.¹⁴ Selain timbulnya masalah kesehatan dari segi fisik, korban ESKA juga mengalami trauma yang mendalam sehingga mengganggu perkembangan emosional mereka.

Para korban banyak terindikasi menderita gangguan stress pasca-trauma (PTSD), depresi, kecemasan dan lainnya. Dampak sosial dari eksploitasi seksual anak di Thailand sangat signifikan. Korban sering menghadapi stigma sosial dan

diskriminasi yang berat, yang menghalangi mereka untuk mencari bantuan dan rehabilitasi.¹⁵ Dampak ekonomi dari eksploitasi seksual anak tidak boleh diabaikan. Anak-anak yang menjadi korban sering kali kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang memadai, yang membatasi peluang mereka untuk memperoleh pekerjaan yang baik di masa depan.¹⁶

Peran ECPAT dalam Menangani ESKA di Thailand

Thailand merupakan negara asal, transit serta tujuan perdagangan anak yang menjadi bagian dari ESKA. Negara ini memiliki karakteristik regional, tingginya tingkat migrasi dan perbatasan tanah yang rapuh serta dengan faktor pendukung lainnya. Jalur serta sektor perdagangan manusia yang terjadi di Asia Tenggara mencakup anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yang diperdagangkan dari Kamboja, Vietnam dan Laos ke Thailand untuk menjadi pekerja, pengemis ataupun tujuan eksploitasi seksual.¹⁷

Alasannya karena hal ini, beberapa peneliti dan aktivis mulai mendirikan sebuah forum untuk menangani ESKA yang akhirnya berkembang dan berhasil

¹⁴ Angela Hawke & Alison Raphael, "The Global Study Report on Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism", (Bangkok: ECPAT International, 2016), hal 20

¹⁵ Human Right Watch, "Sold to be Soldiers: The Recruitments and Use of Child Soldiers in Burma", (<https://www.hrw.org/report/2007/10/31/sold-be-soldiers/recruitment-and-use-child-soldiers-burma>, diakses pada 21 Juni 2024)

¹⁶ International Labour Organization (ILO), "Global Estimates of Modern Slavery:

Forced Labour and Forced Marriage", (Swiss: International Labour Organization (ILO), 2022), 103

¹⁷ Kris Mada, Penyelidikan Berbagai Pihak Terkait Perdagangan Orang Mengarah pada Dua Pusat di Asia Tenggara, Yakni Perbatasan Kamboja-Thailand-Laos dan Perbatasan Laos-Myanmar-Thailand, (<https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/09/07/segitiga-bencana-perdagangan-orang-di-asia-tenggara>), diakses pada 8 September 2024.

menjembatani berbagai kalangan untuk lebih mengenal ESKA dan mencari strateginya. ECPAT berdedikasi untuk mengakhiri ESKA. ESKA yang terjadi di dunia merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang merusak dan mengerikan.

Di Thailand, sebagai negara dengan industri wisata yang bisa dikatakan maju dan juga sebagai negara transit pastinya akan terjadi masalah ESKA yang kompleks ini. Tingginya angka wisatawan, disparitas sosial-ekonomi dan kemajuan teknologi telah mempengaruhi hal ini. Maka dari itu, fenomena yang terjadi melahirkan ECPAT untuk mengatasi dan mengakhiri ESKA terhadap anak-anak.

Peran ECPAT sebagai Educator (Pendidik)

Civil Society Organization (CSO) dapat menjadi *educator* di sini bermaksud bahwa CSO dapat berfungsi sebagai sumber utama pendidikan kewarganegaraan bagi elit politik dan masyarakat umum. Peran pendidikan ini mencakup penyebaran nilai-nilai dan gagasan demokrasi yang bersifat abstrak, yang didapatkan individu saat berpartisipasi dalam CSO, selama organisasi tersebut bersifat demokratis dan berperilaku etis.

Selain itu, terdapat juga pembelajaran politik yang lebih konkret yang diperoleh melalui informasi dan kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh berbagai organisasi. Salah satu tantangan utama bagi rezim demokrasi baru

adalah mendapatkan legitimasi dari warga negaranya. Untuk mencapai legitimasi, masyarakat harus memahami dasar-dasar sistem politik—baik mengenai harapan mereka terhadap lembaga politik, maupun tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.¹⁸

Salah satu program yang dilakukan ECPAT sebagai Educator adalah melakukan *Promoting Rural Opportunities for Children's Empowerment, Education, and Development (PROCEED)*, ECPAT yang berkolaborasi dengan Save The Children dengan menciptakan proyek Peningkatan Peluang Pedesaan untuk Pendidikan dan Pengembangan Pemberdayaan Anak (PROCEED) yang berlangsung pada tahun 2018 hingga tahun 2020.

Dalam dua tahun itu, ECPAT bekerja di wilayah sasaran yaitu Distrik Mae Chan dan provinsi Ching Rai dengan tujuan untuk mendorong dan memberdayakan anak-anak hingga remaja agar memiliki pengetahuan sampai dapat melindungi diri dan teman-teman mereka dari segala resiko dan bentuk eksploitasi seksual komersial anak dan kehamilan yang tidak diinginkan.

Bekerja sama dengan instansi pendidikan seperti sekolah, sektor swasta dan pemerintah untuk memberikan layanan sosial yang berkualitas bagi anak-anak yang beresiko dan bagi penyintas. Selain itu, proyek ini juga mendorong anak-anak untuk mengembangkan keterampilan konseling untuk teman seumurannya. Memberikan informasi bahwa anak-anak ini dapat

¹⁸ Caroline Boussard, "Crafting Democracy: Civil Society in Post-Transition Honduras (Lund: Lund University, 2003), hal 214

mengakses layanan dan saluran-saluran yang sesuai.

Proyek ini juga memberikan pelatihan dan pengajaran mengenai ESKA kepada guru dan tenaga kependidikan daerah sasaran hingga para guru ini menemukan metode untuk edukasi seks kepada remaja guna mengurangi perilaku seksual dan untuk mengurangi jumlah remaja yang hamil dini. Proyek ini juga memberikan pedoman mekanisme pemberian bantuan apabila anak hamil pada saat sekolah agar dapat kembali bersekolah.¹⁹

Dengan adanya pelatihan dan pemberdayaan ini, setidaknya sudah berhasil untuk memberikan bekal kepada anak-anak dan remaja mengenai bahaya ESKA dan kehamilan dini dan dapat menekan risiko dua hal buruk tersebut

Peran ECPAT sebagai Agenda Setter

Civil Society Organization (CSO) sebagai agenda setter bermaksud di mana CSO dapat mendukung pengembangan demokrasi dengan memainkan peran sebagai penggerak kebijakan atau penentu agenda. Mereka memiliki kemampuan untuk menentukan prioritas, terutama terkait isu-isu yang diabaikan atau dihindari oleh pemerintah. Dengan menetapkan agenda tersebut, CSO dapat membantu meningkatkan efisiensi dan memperkuat legitimasi pemerintah di mata publik.

Di Honduras setelah masa transisi, pendekatan ini mungkin merupakan satu-satunya cara untuk menyoroti isu-isu yang tidak diinginkan oleh kalangan elit tradisional. Dalam beberapa situasi, CSO menjadi satu-satunya saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka.²⁰

ECPAT sendiri memiliki peran penting sebagai agenda setter. ECPAT mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan di tingkat nasional dan internasional mengenai perlindungan anak dari kekerasan seksual dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Organisasi ini bekerja dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa isu-isu seperti perdagangan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak mendapatkan perhatian yang layak di ranah kebijakan.

Selain itu, ECPAT mendorong pengembangan kebijakan yang proaktif dan tanggap terhadap perubahan di lapangan, seperti meningkatnya kejahatan eksploitasi seksual *online*. Pertama, ECPAT melakukan Penelitian dan Menyebarkan Informasi, contohnya adalah *Global Study On Sexual Exploitations of Children In Tourism* merupakan sebuah penelitian yang dilakukan ECPAT dengan menggandeng kurang lebih 60 *partners* untuk menyoroti ESAPP

¹⁹ ECPAT International Thailand, "โครงการเสริมสร้างโอกาสเพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและ
การพัฒนาให้เด็กชาติพันธุ์ในท้องถิ่นชนบท: Promoting
Rural Opportunities for Children's
Empowerment Education and Development
(PROCEED)", ([https://www.ecpat-
th.org/project/4/promoting-rural-](https://www.ecpat-th.org/project/4/promoting-rural-)

[opportunities-for-childrensempowerment-
education-and-development.html](https://www.ecpat-th.org/project/4/promoting-rural-), diakses
pada 20 Juli 2024).

²⁰ Caroline Boussard, "Crafting Democracy:
Civil Society in Post-Transition Honduras
(Lund: Lund University, 2003), hal 223

dan menyusun ulang isu ini serta melihat lebih jauh dan lebih luas lagi mengenai ESAPP setelah dirasa gagal dalam upaya menangani ESAPP dalam kurun waktu dua dekade terakhir.

Artinya, penelitian ini hadir untuk memperluas kebijakan, program, hambatan dan penelitian untuk menangani dan mengatasi ESAPP yang terjadi di dunia, termasuk di Thailand. Studi ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk menangani ESAPP menunjukkan keberhasilan.²¹ Salah satu contoh upaya pendekatan yang nampaknya berhasil adalah memobilisasi banyak pemangku kepentingan mulai dari pemerintah hingga masyarakat umum yang didukung dengan data.

Kontribusi lainnya yang dilakukan oleh studi ini adalah meningkatkan fokus pada pelaku kejahatan ESAPP yang merupakan penyebab besar kasus ini. Melakukan sebuah penelitian dapat merekomendasikan serangkaian langkah khusus yang dapat dilakukan oleh pemerintah, NGO ataupun masyarakat yang tugasnya untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual.

Studi ini juga menghasilkan rekomendasi kepada sektor swasta di bidang perjalanan dan wisata serta bidang teknologi komunikasi dan informasi, yaitu melakukan pendekatan terkoordinasi untuk mencegah ESKA dan menciptakan intervensi yang efektif. Lalu, ECPAT menginisiasi Program *Safe Migration: Rights for People on the*

Move untuk Mempromosikan Migrasi yang Aman bagi Anak-anak dan Remaja Pekerja Migran yang didukung oleh salah satu Non-profit Organization, yaitu Diakona Thailand.

Proyek ini dilakukan selama dua tahun yakni dari tahun 2018 hingga 2020. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk mempromosikan pencegahan dan perlindungan migrasi pekerja migran yang aman, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Proyek ini juga bertujuan untuk membangun kerja sama dengan mitra, pemerintah dan sektor swasta, pengusaha, dan pemangku kepentingan untuk mendukung anak-anak yang rentan dan keluarga mereka untuk dilindungi dari ESKA.

Proyek ini dilaksanakan di Chiang Rai dan Chiang Mai, dengan target sasaran pekerja migran beserta keluarganya, instansi pemerintah dan sektor swasta serta majikan dan perusahaan yang menggunakan pekerja migran.²² ECPAT juga menginisiasi Kampanye *Together for the Protection of Children in Tourism in Phuket*, bersamaan dengan semakin berkembangnya pariwisata di daerah Phuket, ECPAT bersama dengan TUI melakukan kerja sama untuk mengedepankan Perlindungan Anak-anak dalam Pariwisata di Phuket.

Proyek ini berlangsung dari tahun 2017 hingga 2019 dengan tujuan utama untuk memperkuat partisipasi banyak sektor relevan demi mempromosikan hak anak untuk untuk tidak dapat dijangkau

²¹ Angela Hawke & Alison Raphael, "The Global Study Report on Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism", (Bangkok: ECPAT International, 2016), hal 16

²² ECPAT International Thailand, "ECPAT Foundation Thailand", (<https://www.ecpat-th.org/en/>), diakses pada 20 Juli 2024.

oleh bahayanya eksploitasi seksual dalam bisnis dan pariwisata di Phuket. Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah pengembangan kapasitas untuk anak-anak serta remaja di kelompoknya mengenai pariwisata.

Mendorong dan membantu mereka untuk percaya diri dalam berbicara di depan umum untuk melatih kepercayaan diri sebagai pemimpin perubahan demi mengatasi masalah ESKA di industri wisata. Mendorong dan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan anak-anak terhadap penggunaan media sosial dan menyediakan layanan pengaduan insiden dan pelayanan untuk merawat korban.²³

Peran ECPAT sebagai *Counterpart* (Mitra)

Secara umum, Civil Society Organization (CSO), dianggap lebih efektif dan memiliki pengetahuan yang lebih mendalam dibandingkan dengan lembaga pemerintah. Mereka sering kali memiliki kehadiran yang lebih luas di lapangan dan hubungan dengan masyarakat sipil yang lebih baik. Misalnya, sementara pemerintah cenderung menawarkan solusi yang itu-itu saja untuk seluruh masyarakat tanpa mempertimbangkan perbedaan kebutuhan di setiap daerah, CSO lebih memahami kebutuhan lokal dan menyesuaikan upaya mereka dengan kondisi spesifik setiap wilayah.

Dengan melibatkan CSO dalam memberikan dukungan kepada pemerintah di bidang-bidang tertentu, harapan dapat meningkat, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi sistem demokrasi. Partisipasi CSO juga dapat membantu penggunaan sumber daya publik menjadi lebih efisien. Namun, ada risiko bahwa pemerintah bisa saja memanfaatkan CSO untuk keuntungannya sendiri.

Meski begitu, dalam beberapa sektor, seperti pembangunan dan penanganan isu-isu spesifik tertentu, keahlian CSO sangat diperlukan. Agar peran pendampingan CSO dapat benar-benar mendukung pembangunan demokrasi, perlu ada hubungan yang saling menguntungkan antara pemerintah dan CSO. Pemerintah perlu mengambil manfaat dari keahlian OMS tanpa menyalahgunakannya sehingga dapat menghasilkan kebijakan baru, dan dalam proses ini, otonomi CSO harus dihormati.

Jika otonomi tersebut dijaga dan pemerintah menjalankan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh, maka kemitraan yang mendukung demokrasi dapat berkembang.²⁴ Dalam banyak kasus, ECPAT berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan kelompok masyarakat, mengkoordinasikan dialog antara aktor-aktor ini untuk memastikan bahwa suara anak-anak dan kelompok rentan didengarkan dalam proses pengambilan keputusan.

²³ ECPAT International Thailand, “โครงการ Together for the Protection of Children in Tourism in Phuket”, (<https://www.ecpat-th.org/project/1/together-for-the->

[protection-of-children-in-tourism-in-phuket.html](https://www.ecpat-th.org/project/1/together-for-the-protection-of-children-in-tourism-in-phuket.html), diakses pada 20 Juli 2024)

²⁴ Caroline Boussard, “*Crafting Democracy: Civil Society in Post-Transition Honduras* (Lund: Lund University, 2003), hal 229

Misalnya, ECPAT sering kali terlibat dalam memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal ratifikasi dan implementasi Konvensi PBB tentang Hak Anak, khususnya Protokol Opsional mengenai penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak.²⁵ ECPAT berkomitmen untuk bekerja sama dengan segala bentuk pemangku kepentingan seperti badan-badan regional, pemerintah nasional, masyarakat sipil, sektor swasta serta organisasi internasional demi mengatasi ESKA yang terjadi.²⁶

Salah satu bentuk kolaborasi ECPAT dengan lembaga lain adalah proyek *Down to Zero*, Proyek *Down to Zero* merupakan kolaborasi dari beberapa NGO, yaitu *End Child Prostitutions and Trafficking* (ECPAT), *Free a Girl*, *Terre des Hommes Netherlands (lead)*, *Plan International Netherlands* dan *ICCO-Cooperation*. Lima NGO ini memiliki visi misi dan tujuan yang sama, yakni untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak anak di dunia dan memerangi Eksploitasi Seksual Anak.

Proyek DtZ ini dibentuk untuk mengakhiri dan memerangi eksploitasi seksual terhadap anak-anak khususnya di wilayah Asia (Thailand, Bangladesh, India,

Indonesia dan Filipina) dan di kawasan Amerika Latin (Brazil, Bolivia, Peru, Republik Dominika dan Nicaragua) dan juga mengatasi masalah eksploitasi seksual anak dalam bisnis perjalanan dan pariwisata serta bahaya online.²⁷ Pendanaan untuk proyek ini disediakan oleh Kementerian Luar Negeri Belanda yang mana durasi dari program ini adalah 5 tahun (2016-2020). Di Thailand sendiri, daerah sasaran dari DtZ adalah provinsi Chiang Rai, Chiang Mai dan wilayah Utara Thailand.

Sasaran dari proyek ini yakni adalah anak-anak dan remaja di bawah 18 tahun, guru, masyarakat, pemimpin dan kelompok bisnis pariwisata seperti agen perjalanan, pemandu wisata, agen hotel dan lain-lain.²⁸ Aktivitas utama yang dilakukan oleh DtZ di Thailand adalah mendukung dan memberdayakan anak-anak serta remaja agar kedepannya dengan pemahaman yang didapat mereka dapat melindungi diri sendiri ataupun teman-teman mereka dari resiko dan bahaya eksploitasi seksual dalam bisnis dan perjalanan dan pariwisata, perdagangan manusia dan bahaya eksploitasi online.

Lalu, DtZ mempromosikan keselamatan dan perlindungan anak-

²⁵ United Nations Children's Fund (UNICEF), *UNICEF Annual Report 2022* (New York: UNICEF, 2023), hal 46

²⁶ ECPAT Indonesia, "Pentingnya Pencegahan Serta Penanganan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) di Level Regional dan Global", (<https://ecpatindonesia.org/berita-detail/pentingnya-pencegahan-serta-penanganan-eksploitasi-seksual-anak-esa-di-level-regional-dan-global>), diakses pada 8 September 2024

²⁷ ECPAT Indonesia, "Pertemuan Aliansi Down to Zero untuk Memperkuat Lobby

dan Advokasi Isu Eksploitasi Seksual Anak", (<https://ecpatindonesia.org/berita-detail/pertemuan-regional-aliansi-down-to-zero-untuk-memperkuat-lobby-dan-advokasi-isu-eksploitasi-seksual-anak>), diakses pada 8 September 2024.

²⁸ ECPAT International Thailand, "โครงการ Down to Zero - Fighting Sexual Exploitation of Children", (<https://www.ecpat-th.org/project/5/down-to-zero.html>), diakses pada 20 Juli 2024).

anak kepada guru, masyarakat dan pemimpin serta mendorong dunia usaha untuk ikut serta melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual dalam perjalanan dan pariwisata. DtZ melakukan advokasi yang konteksnya membawa perubahan dan keadilan bagi korban ESKA di Thailand. Selain berupa aktivitas kampanye dan pemberian edukasi, DtZ juga menghasilkan jalinan kerja sama dengan pemerintah Thailand yang melahirkan *Children Advocacy Centers* (CACs).

Inisiasi ini merupakan respon dari menanggapi kebijakan untuk mengakhiri ESKA. Kerja sama yang terjalin juga melahirkan ThaiHotline untuk melaporkan kejadian yang menyerempet pada ESKA untuk langkah antisipasi yang melayani selama 24 jam. Keberhasilan program *Down to Zero* di Thailand mencakup partisipasi anak-anak dalam kampanye perlindungan anak dan peningkatan kerja sama lintas sektor untuk mengembangkan kebijakan yang melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual, baik di dunia nyata maupun digital.²⁹

SIMPULAN

Thailand adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan Myanmar, Laos, Kamboja, dan Malaysia. Negara ini dikenal dengan budaya yang kaya, pariwisata yang berkembang, dan sejarah yang kuat sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Thailand adalah masalah sosial yang serius

dan kompleks, terutama terkait dengan industri pariwisata. Sebagai salah satu tujuan wisata terbesar di Asia Tenggara, Thailand menarik jutaan wisatawan setiap tahunnya, termasuk mereka yang mencari layanan seksual komersial.

Fenomena ini menjadikan Thailand rawan terhadap praktik eksploitasi seksual anak. ESKA di Thailand mencakup berbagai bentuk, seperti prostitusi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, eksploitasi seksual anak dalam industri pariwisata (*child sex tourism*), dan eksploitasi seksual anak secara daring. Thailand memang mendapat perhatian internasional terkait dengan fenomena Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA).

Meskipun Thailand mengalami kemajuan ekonomi dan sosial, kemiskinan dan penegakan hukum yang lemah masih menjadi faktor yang membuat anak-anak rentan terhadap eksploitasi seksual termasuk menjadi faktor pendorong terbentuknya ECPAT pada tahun 1990-an. Korban dari Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Thailand terutama adalah anak-anak yang rentan, yang dieksploitasi melalui berbagai bentuk kekerasan seksual untuk keuntungan komersial.

Anak-anak ini sering berasal dari keluarga miskin atau masyarakat yang terpinggirkan, yang membuat mereka sangat rentan terhadap perdagangan, pelacuran, dan pornografi anak. Banyak dari mereka berasal dari daerah pedesaan di Thailand, termasuk kelompok etnis minoritas, serta anak-anak migran yang datang dari negara-negara

²⁹ ECPAT International, "Program Down to Zero: Fighting Sexual Exploitation of Children,"

<https://ecpat.org/projects/down-to-zero>.
Diakses pada 12 November 2024.

tetangga seperti Myanmar, Laos, dan Kamboja.

Sebagai CSO yang fokus pada hak-hak anak, ECPAT mengambil peran sebagai agenda setter, pendidik, dan counterpart, ECPAT Thailand berhasil meningkatkan kesadaran dan pengaruh terhadap isu Eksploitasi Seksual Komersial Anak. Mereka membantu menciptakan perubahan signifikan dalam kebijakan publik, meningkatkan kapasitas masyarakat untuk melindungi anak-anak, serta memastikan kerjasama lintas sektor dalam menangani masalah ini dengan lebih efektif.

Secara keseluruhan, ECPAT sebagai CSO di Thailand berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat sipil, pemerintah, dan sektor swasta dalam mengatasi masalah eksploitasi seksual anak. ECPAT berhasil memperkuat upaya perlindungan anak dan memberikan dukungan kepada korban di Thailand antara 2016 hingga 2019.

DAFTAR PUSTAKA

Boussard, C. (2002). *Civil Society and Democratization: Social Movements in Northeast Thailand*. Copenhagen: NIAS Press.

Boussard, C. (2003). *Crafting Democracy: Civil Society in Post-Transition Honduras*. Lund: Lund University.

ECPAT International Thailand. *โครงการ Down to Zero - Fighting Sexual Exploitation of Children*. (Online), <https://www.ecpat-th.org/project/5/down-to-zero.html>. Diakses pada 20 Juli 2024

ECPAT Indonesia. (2022). *Pertemuan Aliansi Down to Zero untuk Memperkuat Lobby dan Advokasi Isu Eksploitasi Seksual Anak*. (Online), <https://ecpatindonesia.org/berita-detail/pertemuan-regional-aliansi-down-to-zero-untuk-memperkuat-lobby-dan-advokasi-isu-eksploitasi-seksual-anak>. Diakses pada 8 September 2024.

ECPAT International. ECPAT Thailand. (Online), <https://www.ecpat-th.org/>. Diakses pada 24 Mei 2024.

ECPAT International (2015). *Situational Analysis of the Commercial Sexual Exploitation of Children in Thailand*. (Online), <https://ecpat.org/situational-analysis-thailand>. Diakses 12 November 2024.

ECPAT International Thailand. *โครงการเสริมสร้างโอกาสเพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและการพัฒนาให้เด็กชาติพันธุ์ในท้องถิ่นชนบท: Promoting Rural Opportunities for Children's Empowerment Education and Development (PROCEED)*. (Online), <https://www.ecpat-th.org/project/4/promoting-rural-opportunities-for-childrensempowerment-education-and-development.html>. Diakses pada 20 Juli 2024.

ECPAT International Thailand. *โครงการ Together for the Protection of Children in Tourism in Phuket*. (Online),

- <https://www.ecpat-th.org/project/1/together-for-the-protection-of-children-in-tourism-in-phuket.html>. Diakses pada 20 Juli 2024.
- ECPAT Indonesia (2022). Pentingnya Pencegahan Serta Penanganan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) di Level Regional dan Global. (Online), <https://ecpatindonesia.org/berita-detail/pentingnya-pencegahan-serta-penanganan-eksploitasi-seksual-anak-esa-di-level-regional-dan-global>. Diakses pada 8 September 2024.
- Gebhard, C. (2018). Student Feature – Levels of Analysis. (Online), <https://www.e-ir.info/2018/02/25/student-feature-levels-of-analysis/>. Diakses pada 15 Januari 2024.
- Hawke, A., dan Raphael, A. (2016). *The Global Study Report on Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism*. Bangkok: ECPAT International.
- Human Right Watch. (2007). Sold to be Soldiers: The Recruitments and Use of Child Soldiers in Burma. (Online), <https://www.hrw.org/report/2007/10/31/sold-be-soldiers/recruitment-and-use-child-soldiers-burma>. Diakses pada 21 Juni 2024
- International Labour Organization (ILO). (2020). *Child Labour and Exploitation in Thailand: An Analysis of Thai Law and Practice*. Geneva: ILO.
- International Labour Organization (ILO). (2020). *Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage*. Swiss: ILO.
- Jordan Greenbaum, *et al.* (2022). Exploitation, Labor, and Sex Trafficking of Children and Adolescents: Health Care Needs of Patients. (Online), <https://publications.aap.org/pediatrics/article/151/1/e2022060416/190310/Exploitation-Labor-and-Sex-Trafficking-of-Children?autologincheck=redirected>. Diakses pada 24 Mei 2024.
- Lestari, E. M., Wiranata, I. M. A., S IP, P. T. K., & Resen, S. (2015). Peran ECPAT dalam Menangani CSEC Oleh Wisatawan Asing di Thailand. *Jurnal Harian Regional*, 3(3).
- Mada, K. (2023). Penyelidikan Berbagai Pihak Terkait Perdagangan Orang Mengarah pada Dua Pusat di Asia Tenggara, Yakni Perbatasan Kamboja-Thailand-Laos dan Perbatasan Laos-Myanmar-Thailand. (Kompas), <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/09/07/segitiga-bencana-perdagangan-orang-di-asia-tenggara>. Diakses pada 8 September 2024.
- Save the Children. (2024). The Fight Against Child Trafficking. (Online),

<https://www.savethechildren.org>. Diakses pada 25 Mei 2024.

United Nation Office on Drugs and Crime. (2012). Strengthening Thai Laws to Fight Travelers Who Sexually Abuse Children. (Online), <https://unodc.org/strengthening-thai-laws-to-fight-travellers-who-sexually-abuse-children>. Diakses pada 14 Januari 2024.

United Nations Children's Fund (UNICEF). (2023). *UNICEF Annual Report 2022*. New York: UNICEF

United Nations Office on Drugs and Crime (2012). United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto. (Online), <https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html>. Diakses pada 24 Mei 2024.

UNICEF Thailand dan ECPAT Foundation. (2023). An Uphill Battle: Child Trafficking Survivors in Thailand Struggle for Justice. (Online), <https://www.ecpat.org/child-trafficking-survivors-in-thailand>. Diakses 12 November 2024.

Webster, M. "Hypothesis vs. Theory: The Difference Explained." (Online), <https://www.merriam-webster.com/words-at-play/hypothesis-vs-theory-difference>. Diakses pada 02 Desember 2023.